

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allerton, Catherine. *Potent Landscapes: Place and Mobility in Eastern Indonesia*.
University of Hawaii Press, 2013.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Filmer, Robert. *Patriarcha: The Natural Power of The Kings*. Second Edi. London,
1685.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Djambatan, 2020.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (Teori
Dan Praktik)*. Cetakan Pe. Malang: Setara Press, 2024.
- Locke, John. *Two Treatises of Government and a Letter Concerning Toleration*.
Yale University Press, 2003.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat
Penerbitan Universitas LPPB-UNISBA, 1995.
- Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif &
Empiris*. Pustaka pelajar, 2010.
- Notonagoro. *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*. Cetakan Pe.
Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Sembiring, Julius. *Pengertian, Pengaturan, Dan Permasalahan Tanah Negara*. 2nd
ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Simarmata, Rikardo. *Kapitalisme Perkebunan Dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh
Negara*. Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar, 2002.

- Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta.” UI press, 1986.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo, 1995.
- Soesangobeng, Herman. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria*. Yogyakarta: STPN press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sumardjono, Maria S. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Surahman, R M. *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*. Vol. 83. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996.
- Sutiknyo, Iman. *Politik Agraria Nasional*. Cetakan 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Tauchid, Mochammad. *Masalah Agraria (Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia)*. Cetakan Ke. Yogyakarta: STPN press, 2020.
- Tjondronegoro, M.P. Sediono, and Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah (Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Wiryani, Fifik. *Hukum Agraria: Konsep Dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*. Cetakan Pe. Malang: Setara Press, 2018.
- Wonnacott, Mark. *Possesion of Land*. First Edit. New York: Cambridge University Press, 2006.

Artikel Jurnal

- Dewi, Iga Gangga Santi. “Rekonstruksi Kebijakan Tanah Eks Kerajaan Di

Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Kasus Tanah Eks Kerajaan Di Bali).” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 2 (2019): 195–207.
<https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.370>.

Kleef, Gerben A Van, and Jens Lange. “How Hierarchy Shapes Our Emotional Lives: Effects of Power and Status on Emotional Experience, Expression, and Responsiveness.” *Current Opinion in Psychology* 33 (2020): 148–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.07.009>.

Limbong, Dayat. “Tanah Negara, Tanah Terlantara Dan Penertibannya.” *Jurnal Mercatoria* 10 (2017).

Meyer, John W, and Bryan Rowan. “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.” *American Journal of Sociology* 83 (1977).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1086/226550>.

Munduate, Lourdes, and Fransisco J Medina. “How Does Power Affect Those Who Have It and Those Who Don’t? Power Inside Organizations.” In *An Introduction to Work and Organizational Psychology: An International Perspective*, First Edit. John Wiley & Sons, 2017.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119168058.ch10>.

Nadzir, Muhammad, and Prapti Ramadhani. “Status Hukum Tanah Grant Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Journal de Facto* 4, no. 2 (2017): 245–61.

Sari, Novi Mardihana, and I Nyoman Budiana. “Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Kertha Semaya* Vol 8 No 9 (2020): 1324–31.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p03>.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Afandi, Fachrizal. “Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the Case of Indonesia.” Disertasi, Leiden University, 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. “Studi Pendefinisian Dan Penyederhanaan Perangkat Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Negara.” Jakarta, 2004.

Kurniati, Nia, Ismail, Barita Simanjuntak, Herman Soesangobeng, Siswanto, Ahmad Ya’kub, Marulak Pardede, Suharyo, Evi Djuniarti, and Melok Karyandani. “Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat.” Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.

Sembiring, Julius. “Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional.” Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016.

Simarmata, Rikardo, and Tody Sasmita Jiwa Utama. “Menentukan Sendiri Jalan Menuju Hak Atas Tanah: Review Atas Berbagai Pengakuan Tenurial Di Indonesia.” Indonesia, 2021

Yusuf, Putri Dewinta. “Independensi Jaksa Dalam Penuntutan Yang Berdasarkan Asas Satu Dan Tak Terpisahkan (Een En Onedelbaarheid) (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Konawe Dan Kejaksaan Negeri Bau-Bau).” Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2024.

Internet

Darmadi, Virgilia Adventia. “Demo Terminal Kembur, PMKRI Cabang Ruteng:

Copot Dan Periksa Kajari Manggarai.” Oke Flores, 2023.

[https://flores.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2976746482/demo-terminal-](https://flores.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2976746482/demo-terminal-kembur-pmkri-cabang-ruteng-copot-dan-periksa-kajari-manggarai?page=all)

[kembur-pmkri-cabang-ruteng-copot-dan-periksa-kajari-manggarai?page=all.](https://flores.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2976746482/demo-terminal-kembur-pmkri-cabang-ruteng-copot-dan-periksa-kajari-manggarai?page=all)

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,”

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli.](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ahli)

Kenaru, Jo. “Bangun Terminal Kembur Di Atas Tanah Tak Bersertifikat, Kejari

Manggarai Tahan 2 Tersangka.” TV One News, 2022.

[https://www.tvonenews.com/daerah/bali/78078-bangun-terminal-kembur-di-](https://www.tvonenews.com/daerah/bali/78078-bangun-terminal-kembur-di-atas-tanah-tak-bersertifikat-kejari-manggarai-tahan-2-tersangka?page=all)

[atas-tanah-tak-bersertifikat-kejari-manggarai-tahan-2-tersangka?page=all.](https://www.tvonenews.com/daerah/bali/78078-bangun-terminal-kembur-di-atas-tanah-tak-bersertifikat-kejari-manggarai-tahan-2-tersangka?page=all)

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah
Negara;;

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Jaksa Agung No. PER-046/A/JA/12/2011 tentang SOP Terintegrasi
Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Jaksa Agung No. PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan
Perkara Tindak Pidana Umum;

Peraturan Jaksa Agung No, 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung No. PER-010/A/JA/05/2014 tentang SOP Pelacakan Aset;

Peraturan Jaksa Agung No.PER028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi;

Peraturan Jaksa Agung No. 6 tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan
Cabul Terhadap Anak;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang
Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar
Nomor 96/PID.Sus.Tpk/2017/PN.Mks;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor 15/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor
10 /Pid.Sus-TPK/2023/PT Kpg;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5047 K/Pid.Sus/2023;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1767 K/PID.SUS/2018;